

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (099075)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2022



Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung

Lebak - Banten 42314

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057

e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
099075**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILANUMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057

Lebak - Banten 42314

e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebak, 20 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002

DAFTAR ISI

E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
E.1.	Ekuitas Awal	35
E.2.	Surplus (defisit) LO	35
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	35
E.4.	Transaksi Antar Entitas	35
E.5.	Ekuitas Akhir	35
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	36
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	36
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	36

Laporan-laporan Pendukung

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	20
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Rangkasbitung	20
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	21
A.3. Basis Akuntansi	21
A.4. Dasar Pengukuran	21
A.5. Kebijakan Akuntansi	22
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	30
B.1. Pendapatan	31
B.2. Belanja	31
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
C.1. Aset Lancar	32
C.2. Ekuitas	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	33
D.2. Beban Persediaan	33
D.3. Beban Barang dan Jasa	34
D.4. Beban Perjalanan Dinas	34

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung Lebak - Banten 42314

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057 e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lebak, 20 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



DARSONO, S.H.

NIP. 196607091989031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Per 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 25.691.000,- atau mencapai 197,18% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 13.029.000,-

Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 99.907.000,- atau mencapai 98,82% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 101.100.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan Aset sebesar Rp. 1.219.425,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 1.219.425,- dan Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp. 0,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0,- dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,-

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 1.219.425,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 25.691.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 110.114.093,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 84.423.093). Kegiatan Non Operasional Rp. 0,- dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing Surplus (defisit) sebesar (Rp. 0), sehingga entitas mengalami (defisit) -LO sebesar (Rp. 84.423.093).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 3.567.200,- dikurangi (defisit)-LO sebesar (Rp. 84.423.093) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 82.075.318,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.219.425,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Per 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	Per 31 Desember 2022			Per 31 Desember 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	13.029.000	25.691.000	197,18	22.924.000
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		13.029.000	25.691.000	197,18	22.924.000
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Barang	B.2.1.	101.100.000	99.907.000	98,82	95.260.000
Jumlah Belanja Negara		101.100.000	99.907.000	98,82	95.260.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER	31 DESEMBER 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	1.219.425	3.567.200
Jumlah Aset Lancar		1.219.425	3.567.200
Jumlah Aset		1.219.425	3.567.200
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.2. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		00	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	1.219.425	3.567.200
Jumlah Ekuitas		1.219.425	3.567.200
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		1.219.425	3.567.200

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	25.691.000	22.294.000
Jumlah Pendapatan		25.691.000	22.294.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	28.104.093	25.745.294
Beban Barang dan Jasa	D. 4	43.515.000	44.132.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	38.495.000	37.135.000
Jumlah Beban		110.114.093	107.012.294
(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(84.423.093)	(84.088.294)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	D. 7	0	32.500
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	D.9	0	9.500
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	23.000
Pos Luar Biasa	D. 10	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(84.423.093)	(84.088.294)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	E. 1	3.567.200	5.893.900
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(84.423.093)	(84.088.294)
Transaksi Antar Entitas	E. 3	82.075.318	81.761.594
Kenaikan/penurunan ekuitas		(2.347.775)	(2.326.700)
Ekuitas Akhir		1.219.425	3.567.200

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengadilan Negeri Rangkasbitung didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Rangkasbitung terletak di Jalan RA Kartini No. 55 Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten.

Visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah "MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG YANG AGUNG" Visi sendiri memiliki pengertian suatu pernyataan mengenai tujuan dari organisasi yang disampaikan atau diekspresikan melalui pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai yang didapatkan juga aspirasi dan cita-cita dimasa yang akan datang.

Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Rangkasbitung melakukan beberapa langkah-langkah strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian Perkara
2. Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
6. Meningkatnya kualitas Pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkasbitungkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Rangkasbitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR),

atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuranyang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dank as yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara

umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp.
25.691.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 25.691.000 atau mencapai 197,18% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 13.029.000,-. Pendapatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung terdiri dari Pendapatan uang meja (leges) upah pada panitera badan peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya dan Pendapatan Pengesahan Surat di bawah Tangan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP

No.	Uraian	31 Desember 2022		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (leges) Upah pada Panitera Badan Peradilan	270.000	330.000	122,22
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	4.470.000	5.890.000	131,77
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	8.249.000	19.431.000	235,56
4.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	40.000	40.000	100,00
Total Pendapatan		13.029.000	25.691.000	197,18

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1.	Pendapatan Uang Meja (leges) Upah pada Panitera Badan Peradilan	330.000	10.000	96,97
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	5.890.000	4.210.000	28,52
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	19.431.000	18.654.000	3,99
4.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	40.000	50.000	(25,00)
Total Pendapatan		25.691.000	22.924.000	10,77

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara
a :
Rp.
99.907.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 99.907.000 atau sebesar 98,82% dari anggaran senilai Rp. 101.100.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember TA 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	101.100.000	99.907.000	98,82
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	101.100.000	99.907.000	98,82
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	101.100.000	99.907.000	98,82

Dibandingkan dengan 31 Desember 2021, Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,65% Hal ini disebabkan karena peningkatan pemberitahuan penahanan dan perpanjangan penahanan perkara pidana dan pemberitahuan jadwal sidang pertama.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	99.907.000	95.260.000	4,65
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja	99.907.000	95.260.000	4,65

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang :
Rp.
99.907.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 99.907.000 dan Rp. 95.260.000. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,65% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Non Operasional	11.799.000	12.880.000	(9,16)
Belanja Jasa Konsultasi	31.200.000	31.200.000	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	38.495.000	37.135.000	3,53
Belanja Persediaan	17.897.000	13.993.000	21,81
Belanja Barang Operasional	516.000	52.000	89,92
Total Belanja Brutto	99.907.000	95.260.000	4,65
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	99.907.000	95.260.000	4,65

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp.
1.219.425

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.219.425,- dan Rp. 3.567.200,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan	1.219.425	3.567.200
Total Aset Lancar	1.219.425	3.567.200

C.1.1. Persediaan

Persediaan: Rp.
1.219.425

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.219.425,- dan Rp.3.567.200,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	1.219.425	3.567.200
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	1.219.425	3.567.200

C.2. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp. 1.219.425,-*

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.219.425,- dan Rp. 3.567.200,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Per tanggal 31 Desember 2022 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar (Rp. 2.347.775,-) atau (65,82%) dari nilai per 31 Desember TA 2021.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Rp. 25.691.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 25.691.000,- dan Rp. 22.924.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	%
Pendapatan uang meja (leges) upah pada panitera badan peradilan	330.000	10.000	96,97
Pendapatan Ongkos Perkara	5.890.000	4.210.000	28,52
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	19.431.000	18.654.000	3,99
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	40.000	50.000	(25,00)
Total Pendapatan	25.691.000	22.924.000	10,77

D.2. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp. 28.104.093*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 28.104.093,- dan Rp. 25.745.294,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	%
Beban Persediaan Konsumsi	28.104.093	25.745.294	9,16
Total Beban Persediaan	28.104.093	25.745.294	9,16

D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa
Rp. 43.515.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 43.515.000,- dan Rp. 44.132.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	516.000	52.000	89,92
Beban Bahan	11.799.000	12.880.000	(9,16)
Beban Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	0,00
Total Beban Jasa	43.515.000	44.132.000	(1,41)

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp. 38.495.000,-

Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 38.495.000,- dan Rp. 37.135.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	%
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	38.495.000	37.135.000	3,66
Total Beban Perjalanan Dinas	38.495.000	37.135.000	3,66

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Operasional : (Rp.
84.423.093,-)

Pos Surplus dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Operasional per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Beban penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Surplus (deficit) Kegiatan Non Operasional	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp.3.567.200* Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 01 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.567.200,- dan Rp. 5.893.900,-

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit) LO :
(Rp. 84.423.093)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp. 84.423.093,-) dan (Rp. 84.088.294,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi: Rp. 0.* Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp. 82.075.318,-* Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 82.075.318,- dan Rp. 81.761.594,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp. 1.219.425* Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.272.000,- dan Rp. 3.567.200,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Dari Tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak ada kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 tidak ada pendapatan dan belanja akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah:

- BTN Cab. Cilegon A/C 0004701300007813 a.n. RPL 161 PDT PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG UNTUK BIAYA PERKARA 099075 yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 23.652.193.404,30.
- BRI A/C 0080-01-000679304 a.n. BPG: 161 PN RKBT (099075) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu ongkos perkara yang digunakan selama proses pemeriksaan perkara tersebut sebesar Rp. 89.861.463,- terdiri dari saldo pada bank sebesar Rp. 76.934.063 dan uang tunai pada brankas Rp. 12.927.400
2. Biaya Konsinyasi sebesar Rp. 23.557.856.341,30,-.
3. Biaya Eksekusi sebesar Rp. 17.403.000

F.2.5. Revisi DIPA

Sampai per 31 Desember 2022 Ada Revisi DIPA untuk DIPA BADILUM (03) pada Tahun Anggaran 2022.

- Revisi Ke 01 tanggal 12 April 2022 tentang Update Halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.
- Revisi Ke 02 tanggal 06 Juli 2022 tentang Update Halaman III DIPA Rencana Dana dan Perkiraan Penerimaan, pengesahan POK.
- Revisi Ke 03 tanggal 27 September 2022 tentang Updat Halaman III DIPA Rencana Dana dan Perkiraan Penerimaan, Pengesahan POK

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB :

- ✓ Pada periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 tidak ada Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting periode 31 Desember 2022.

LAPORAN PENDUKUNG

LAPORAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
PERIODE 1 JANUARI 2022 S.D 31 DESEMBER 2022

Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
Januari s.d Desember 2022	Biaya Perkara	Rp 38.588.963	Rp 311.655.500	Rp 260.383.000	Rp 89.861.463	Rp 76.934.063	Rp 12.927.400
	Biaya Eksekusi	Rp 8.458.000	Rp 16.180.000	Rp 7.235.000	Rp 17.403.000	Rp 17.403.000	-
	Biaya Konsinyasi	Rp 23.981.105.605	Rp 3.550.409.000	Rp 3.973.658.264	Rp 23.557.856.341	Rp 23.557.856.341	-
JUMLAH		Rp 24.028.152.568	Rp 3.878.244.500	Rp 4.241.276.264	Rp 23.665.120.804	Rp 23.652.193.404	Rp 12.927.400

Rangkasbitung, 18 Januari 2023
 Sekretaris


DARSONO, S.H.
 NIP. 19660709 198903 1 002

Mutasi Rekening

Perusahaan PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
 Rekening 0004701300007813/RPL 161 PDT PENGADIL (IDR)
 Cabang Rekening 00047 - KC CILEGON
 Jangka Waktu 01-Dec-2022 to 27-Dec-2022
 Saldo Awal 23.659.501.404.30
 Saldo Akhir 23.652.193.404.30
 Total Transaksi Debet 1
 Total Transaksi Kredit 5

No.	Tanggal Cetak	Tanggal Posting	Tanggal	Tanggal Efektif	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	Nomer Referensi
1	05-Dec-2022	14:42:08	05-Dec-2022	14:42:08	TAMBAH PANJAR BIAYA PERKARA NO 1	0.00	500.000.00	23.660.001.404.30	22120500136780000176
2	07-Dec-2022	10:23:14	07-Dec-2022	10:23:14	0098899782222120002 SUYONO	0.00	550.000.00	23.660.551.404.30	221207993000580143511
3	12-Dec-2022	10:54:01	12-Dec-2022	10:54:01	BIAYA PANJAR PERKARA KASASI	0.00	6.677.000.00	23.667.228.404.30	22121200136780000049
4	12-Dec-2022	14:06:10	12-Dec-2022	14:06:10	CEK/DESTRIA/18711161129700008/TO865178	20.000.000.00	0.00	23.647.228.404.30	22121200136780000064
5	13-Dec-2022	15:28:59	13-Dec-2022	15:28:59	0098899782222120003 SUPRIYADI	0.00	110.000.00	23.647.338.404.30	22121393000060535212
6	16-Dec-2022	21:54:54	16-Dec-2022	21:54:54	0098899782222120004 HENDRI YANSYAH ST-SHM	0.00	4.855.000.00	23.652.193.404.30	22121693000450243950
						20,000,000.00	12,692,000.00		



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Jalan R.A. Kartini No. 55 Telp./Fax (0252) 201057 Rangkasbitung 42314
email: info@pn-rangkasbitung.go.id

BERITA ACARA STOCK OPNAME FISIK SEMESTER II TAHUN 2022
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (099075)
NOMOR : W29.U3/ 380 /UK.02.02/II/2023

Pada hari ini Senin, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : DARSONO, S.H
NIP : 196607091989031002
Jabatan : Sekretaris (Kuasa Pengguna Barang)
- II. Nama : AGUS MULYADI, S.Sos
NIP : 197908272006041004
Jabatan : Kasubbag. Umum & Keuangan (Pengelola Barang Persediaan)

Menyatakan bahwa telah melakukan *stock opname* barang persediaan periode Semester II Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

KODE	URAIAN	JML BRG
1	2	3
1010301001-000001	Pulpen Gel Kenko Boxes	2 boxes
1010301001-000003	Pulpen Standard AE7 Fine	2 boxes
1010301003-000001	Penjepit Kertas Binder Clips No. 260	2 boxes
1010301003-000002	Penjepit Kertas Binder Clips No. 107	9 boxes
1010301004-000001	Penghapus/Korektor Tip-Ex	8 pcs
1010301005-000003	Buku Ekspedisi	3 pcs
1010301006-000002	Map Senel Hekter Buffalo	1 boxes
1010301008-000001	Cutter Besar	7 pcs
1010301008-000003	Gunting Besar	5 pcs
1010301010-000003	Alat Perekat Isolatip Putih Besar	3 pcs
1010301012-000001	Staples Kecil	2 pcs
1010301012-000002	Staples Besar	2 pcs
1010301013-000005	Isi Staples Kecil Boxes	4 boxes
1010301013-000006	Isi Staples Besar Boxes	13 boxes
1010302001-000002	Kertas HVS F4 80 gr	4 rim
1010302001-000003	Kertas HVS Warna	1 rim
1010302002-000009	Post It Warna Warni	3 pcs
1010303002-000010	Tinta Canon Hitam Botol	4 pcs
1010304003-000003	Tinta Cetak Dataprint DP-41	2 set

Demikian Berita Acara stock opname ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Barang

DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002

Pengelola Barang Persediaan

AGUS MULYADI, S.Sos
NIP. 197908272006041004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 21/07/23 9:52 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,567,200	5,893,900	(2,326,700)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(84,423,093)	(84,088,294)	(334,799)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	82,075,318	81,761,594	313,724	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,347,775)	(2,326,700)	(21,075)	-
EKUITAS AKHIR	1,219,425	3,567,200	(2,347,775)	-

Keterangan :

FINAL

Kuasa Pengguna Anggaran, 21 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Darsono, S.H.

196607091989031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Tgl Data : 26/05/23 3:54 AM

Tgl Cetak : 21/07/23 9:51 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	25,691,000	22,924,000	2,767,000	12.07
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	25,691,000	22,924,000	2,767,000	12.07
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	25,691,000	22,924,000	2,767,000	12.07
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	28,104,093	25,745,294	2,358,799	9.162
Beban Barang dan Jasa	43,515,000	44,132,000	(617,000)	(1.398)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	38,495,000	37,135,000	1,360,000	3.662
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Tgl Data : 26/05/23 3:54 AM

Tgl Cetak : 21/07/23 9:51 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	110,114,093	107,012,294	3,101,799	2.899
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(84,423,093)	(84,088,294)	(334,799)	0.398
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(84,423,093)	(84,088,294)	(334,799)	0.398
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(84,423,093)	(84,088,294)	(334,799)	0.398

Keterangan :

FINAL

Kuasa Pengguna Anggaran, 21 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Darsono, S.H.

196607091989031002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
 Tgl Cetak : 21/07/23 9:50 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	1,219,425	3,567,200	(2,347,775)	(65.82)
JUMLAH ASET LANCAR	1,219,425	3,567,200	(2,347,775)	(65.82)
JUMLAH ASET	1,219,425	3,567,200	(2,347,775)	(65.82)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,219,425	3,567,200	(2,347,775)	(65.82)
JUMLAH EKUITAS	1,219,425	3,567,200	(2,347,775)	(65.82)
JUMLAH EKUITAS	1,219,425	3,567,200	(2,347,775)	(65.82)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,219,425	3,567,200	(2,347,775)	(65.82)

Keterangan :
 FINAL

Kuasa Pengguna Anggaran, 21 Juli 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

Darsono, S.H.
 196607091989031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



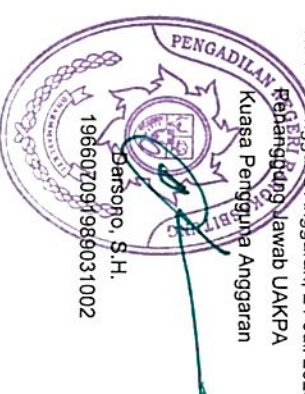
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG 099075

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 21/07/23 9:53 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	101,100,000	99,907,000	1,193,000	99	99,600,000	95,260,000	4,340,000	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :
FINAL

Kuasa Pengguna Anggaran, 21 Juli 2023
PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG
Kuasa Pengguna Anggaran



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

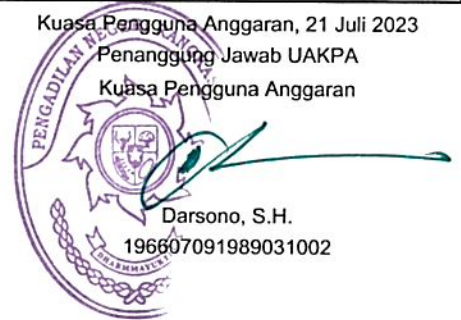
Tgl Data : 26/05/23 3:54 AM
 Tgl Cetak : 21/07/23 9:48 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,219,425	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	99,907,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	25,691,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	7,859,318
0.0	391111	Ekuitas	0	3,567,200
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	40,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	330,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	5,890,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	19,431,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	516,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	11,799,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	31,200,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,495,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	28,104,093	0
JUMLAH			137,024,518	137,024,518

Keterangan :
 FINAL

Kuasa Pengguna Anggaran, 21 Juli 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
SATUAN KERJA : 099075 **PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 21/07/23 2:25 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			4 PENDAPATAN	5 PENGEMBALIAN PENDAPATAN	6=4-5 PENDAPATAN NETTO	
1	2 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	40,000	40,000	0	40,000	100
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	270,000	330,000	0	330,000	122.22
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	4,470,000	5,890,000	0	5,890,000	131.77
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	8,249,000	19,431,000	0	19,431,000	235.56
425239	Pendapatan Pelaksanaan dan Peradilan Lainnya	13,029,000	25,691,000	0	25,691,000	197.18
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	13,029,000	25,691,000	0	25,691,000	197.18
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	13,029,000	25,691,000	0	25,691,000	197.18
	JUMLAH PENDAPATAN	13,029,000	25,691,000	0	25,691,000	197.18

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 099075
JENIS SATUAN KERJA : KD

**MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
BANTEN
PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 21/07/23 3:05 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_ira_bel_akun_sakker
 Tgl Data : 26/5/23 6:02 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	600,000	600,000	516,000	0	516,000	86	84,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	600,000	600,000	516,000	0	516,000	86	84,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	600,000	600,000	516,000	0	516,000	86	84,000
5212	Belanja Barang Non Operasional	23,700,000	11,800,000	11,799,000	0	11,799,000	99.99	1,000
521211	Belanja Bahan	23,700,000	11,800,000	11,799,000	0	11,799,000	99.99	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	23,700,000	11,800,000	11,799,000	0	11,799,000	99.99	1,000
5218	Belanja Barang Persediaan	10,000,000	17,900,000	17,897,000	0	17,897,000	99.98	3,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,000,000	17,900,000	17,897,000	0	17,897,000	99.98	3,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	10,000,000	17,900,000	17,897,000	0	17,897,000	99.98	3,000
5221	Belanja Jasa	31,200,000	31,200,000	31,200,000	0	31,200,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultansi	31,200,000	31,200,000	31,200,000	0	31,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	31,200,000	31,200,000	31,200,000	0	31,200,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	35,600,000	39,600,000	38,495,000	0	38,495,000	97.21	1,105,000
524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Kota	35,600,000	39,600,000	38,495,000	0	38,495,000	97.21	1,105,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	35,600,000	39,600,000	38,495,000	0	38,495,000	97.21	1,105,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	101,100,000	101,100,000	99,907,000	0	99,907,000	98.82	1,193,000
	JUMLAH BELANJA	101,100,000	101,100,000	99,907,000	0	99,907,000	98.82	1,193,000